

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Demokrasi diartikan sebagai sistem yang memiliki dualisme pengertian yaitu sistem nilai dan sistem pemerintahan, sebagaimana yang artinya nilai, demokrasi suatu nilai yang memiliki suatu keadaban politik yang mencakup *Independensi*, kesamaan, toleransi kebersamaan, anti represif, anti belenggu, dan kepercayaan aktif. Hal tersebut berarti bahwa sistem pemerintahan demokrasi merupakan hadirnya suatu ikatan fungsional antara pemerintah dan yang diperintah. Namun, ada yang kesalahan dalam penggunaan demokrasi yang hanya sebatas alat dan tujuan tetapi harus ada unsur cara tujuan dan nilai (intelektual). Dalam sistem demokrasi terdapat konsep untuk mengubah suara masyarakat menjadi posisi kekuasaan dan bagaimana aturan berpikir dan bertindak dalam *rules* sosial-politik. Tujuan demokrasi sendiri berorientasi bahwa suatu sistem pemerintahan haruslah menempatkan kekuasaan untuk berlaku adil (Pratikno, 2019).

Maka dari itu demokrasi menghendaki adanya Pemilihan umum (Pemilu) sebagai bagian dari proses terciptanya pemerintahan yang demokratis. Pemilu di Indonesia diselenggarakan dengan pembiayaan yang cukup besar dan dialokasikan untuk memobilisasi pemilih serta proses melakukan pemilihan. Pemilu yang bebas dan adil di Indonesia. Elemen terpenting selama proses Pemilu yaitu menciptakan kepercayaan di tengah-tengah masyarakat mengenai calon kandidat dengan

memberikan informasi mengenai calon kandidat dan dapat mengelola sumber informasi sesuai keperluan dan tujuan. Dalam proses menciptakan kepercayaan tidak ada yang namanya pemikat seperti janji-janji yang diberikan oleh para calon kandidat dalam kampanyenya, jadi bagi masyarakat harus lebih teliti dan cerdas dalam menanggapinya. Dengan menjadi lebih selektif sesuai dengan hati nurani. Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka murni, pada pemilu 2009, berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2008, penetapan calon terpilih dilakukan sesuai dengan perolehan suara terbanyak bagi calon yang memperoleh suara lebih dari 30% Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Tapi pada pokoknya tetap mengacu pada nomor urut. Sebab, baik sistem proporsional dengan daftar calon terbuka pada pemilu 2004, maupun sistem proporsional terbuka murni pada pemilu 2009, sama-sama diklaim sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat (Fahmi, 2010; Ramadhanti, 2022).

Elite politik merupakan individu yang menduduki posisi sebagai pemimpin pada puncak institusi yang ada di masyarakat. Karena dilihat dari kedudukan institusional mereka yang utama, oleh karena itu, elit dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat seluruh anggota masyarakat. Mereka menduduki posisi comando pada institusi-institusi ekonomi, militer, dan politik. Individu-individu yang termasuk dalam kelompok elit merupakan golongan yang relatif sangat terpadu, homogen, dan erat berhubungan satu dengan lainnya. Mereka yang menduduki puncak dalam bidang ekonomi, militer, dan politik berasal dari latar belakang sosial dan pandangan hidup yang relatif serupa. Pandangan hidup mereka banyak menunjukkan persamaan karena kebanyakan di antara mereka mempunyai

latar belakang pendidikan dan agama yang sama serta sering bertemu dalam perkumpulan yang diselenggarakan oleh berbagai kelompok sosial yang sama. Dalam praktiknya, Pemilu Legislatif (Pileg) sering kali dijumpai para elite politik “bermain” dan memiliki cara untuk mencari suara yang bertujuan untuk kemenangan kontestasi (Chalik, 2017).

Yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian tentang kekuatan politik Nanang Permana pada Pemilu legislatif (Pileg) Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis, sebelum membahas lebih lanjut pembahasan pertama terkait tentang dinamika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dari jumlah DPRD Kabupaten Ciamis sebanyak 50 kursi, PDIP memperoleh 7 kursi dengan total suara 118.641. Perolehan tersebut menjadi partai yang memperoleh terbanyak bersama dengan Partai Amanat Nasional dengan kursi yang sama dengan total suara 11.8641. Hal tersebut membuktikan konsistensi PDIP dalam politik Kabupaten Ciamis dan sedangkan pada Pileg periode 2019-2024 PDIP memperoleh 9 kursi dengan memperoleh suara 124.642 meskipun adanya penurunan suara dengan selisih 6001 suara (Ciamis Zone, 2024; KPU Kabupaten Ciamis, 2019; KPU Kabupaten Ciamis 2024).

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Pileg PDIP Kabupaten Ciamis Periode 2019 dan 2024**

| Tahun 2019    | Tahun 2024    |
|---------------|---------------|
| 124.642 Suara | 118.641 Suara |
| 9 Kursi       | 7 Kursi       |

*Sumber data: data KPU 2019;2024 dan Ciamis Zone*

Dalam perebutan kursi legislatif, tentu memiliki proses dalam mencari cara yang berbeda beda antar calon legislatif, pada penelitian ini akan membahas tentang bagaimana kekuatan politik Nanang Permana dalam memenangkan Pileg tahun 2024 di Kabupaten Ciamis. Nanang merupakan Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI-P Kabupaten Ciamis dan Ketua DPRD Kabupaten Ciamis setelah periode sebelumnya juga dia menjadi Ketua DPRD. Nanang mencalonkan di Daerah Pemilih (Dapil) V yakni Kecamatan Lakbok, Banjarsari, Purwadadi, dan Banjaranyar dengan memperoleh suara sebanyak 8800 suara, tahun 2019 memperoleh 6.002 suara, tahun 2014 memperoleh 7.003 suara di Dapil yang sama. ,dalam wawancara bersama Rico<sup>1</sup> peneliti menemukan bagaimana perjalanan Nanang dalam masuk dunia politik. Dia memiliki latar belakang sebagai wirausaha dengan merintis karir politik masuk menjadi jajaran PDIP menjadi pengurus ranting, kecamatan, dan pada akhirnya bisa menjadi pengurus Cabang. Dia merupakan kader asli yang membentuk ideologis politik dari stratifikasi bawah hingga akhirnya lambat laun menjadi elite politik PDI-P. Kedekatan dengan Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Muhammad Nurdin<sup>2</sup>, Ida Nurlela Wiradinata<sup>3</sup>, dan Mayor Jenderal (Purn) Dr.H.Tubagus Hasanudin<sup>4</sup> menjadi salah satu kelebihan Nanang untuk menjadi seorang politikus dengan memiliki kedekatan dengan elite lain yang memiliki jabatan di kepengurusan pusat dan wilayah. Nanang juga sudah menjabat selama sudah menjabat selama 4 periode (Periode 2009, 2014, 2019, dan

---

<sup>1</sup> Merupakan anggota partai PDI-P Kabupaten Ciamis, yang sebelumnya menjadi bagian tim sukses Nanang pada Pemilu 2024

<sup>2</sup> Politikus PDIP, POLRI, dan pernah menjadi Anggota DPR RI Jawa Barat III (2007-2009) dan Jawa Barat X (2009-2014)

<sup>3</sup> Politikus PDIP dan Anggota DPR RI Jawa Barat X (2024-2029)

<sup>4</sup> Politikus PDIP, TNI, dan pernah menjadi Anggota DPR RI Jawa Barat IX

2024). Memang ini menjadi suatu kelebihan bagaimana seorang politisi bisa menjadi elite lokal daerah dimana salah satu bentuk kekuatan Parpol membentuk kader yang terbaik untuk bisa menjadi pemimpin di wilayahnya. Berbicara mengenai PDI-P kuat dalam Pemilu dan Pileg 2024. karena alasan kuatnya basis massa yang stabil dan caleg-caleg yang memiliki kinerja yang baik di akar rumput. Akan tetapi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kalah karena adanya *split voting* dan pengaruh dari Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang sering kali mengendorse calon yang bukan dari PDIP, selain itu dominasi mesin politik dari koalisi lain dan karakteristik konstituen yang suara akan terpecah belah (Republika, 2024; CNN,2024).

Parpol menjadi suatu instrumen politik dalam membentuk elite politik daerah. Selain sebagai kendaraan politik bagi para politisi, Parpol juga memiliki fungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Elite politik daerah terbentuk karena adanya proses keterlibatan Parpol dalam membentuk karakteristik politisi. Karena kekuatan itulah Parpol menjadi penentu siapa saja yang akan maju menjadi calon dan memberikan kontribusi sumber daya untuk menjadi bagian operasional kampanye. Dalam otonomi daerah, Parpol menjadi pengendali terhadap keputusan kebijakan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di daerah. Dalam konstelasi politik daerah sering diikuti oleh elite Parpol yang ada di daerah tersebut. Eksistensi dan fungsi elite tersebut memang tidak begitu dirasa luas oleh masyarakat, karena mereka pada dasarnya merasakan kehadiran mereka pada momentum lima tahun sekali. Para elite terlalu sibuk untuk mempersiapkan persaingan perebutan suara dibandingkan mengutamakan fungsi Parpol sebagai

stabilitas pembangunan yang ada di daerah. Sehingga minimnya fungsi sebagai instrumen politik. Kuatnya Parpol yang dipengaruhi oleh aktor dan pengurusnya yang seharusnya menjadi mediator antara masyarakat dengan pemerintah dan pendidikan politik masyarakat, malah digunakan sebagai keputusan pragmatis (Wibisono dan Zainul, 2020; The Conversation, 2024; Halim, 2018).

Kekuatan Parpol sebagai salah satu kekuatan politik yang ada di Indonesia mempengaruhi terbentuknya elite daerah. Hal tersebut karena Parpol memiliki aspek untuk memobilisasi jaringan luas dengan menggerakkan militansi atau konsisten untuk selalu patuh terhadap keputusan partai sehingga suara mereka dapat memenangkan suatu pemilihan. Parpol memiliki sumber daya finansial sebagai modal untuk memberikan dana bagi kegiatan kampanye atau politik lainnya, tentu sumber daya menjadi bagian penting dalam kemenangan suatu Pemilu. Parpol juga memiliki pengaruh dalam mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang dibentuk di daerah, tentu hal tersebut memberikan ruang untuk elite daerah untuk bisa memasuki kepentingan mereka. Setelah disinggung di paragraf atas terkait kaderisasi yang baik, Parpol dapat membentuk elite yang berpotensi membentuk kekuasaan di daerah mereka. Dalam kontelasi sering kali Parpol memiliki jaringan terlepas siapa saja musuh dan kawan (aliansi dan koalisi) sesama Parpol, akan tetapi hal tersebut justru memberikan kekuatan untuk memberikan kekuasaan absolut kepada para elite politik (Laosa, 2024; Farisi dan Hariadi, 2017).

Penelitian yang memiliki fokus yang sama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muzadi dan Fitriyah tahun 2020 dengan judul, “*Kemenangan Hatrick (Strategi Keterpilihan Een Rusmiyati dalam Pemilu Legislatif 2019 di Kota*

*Cirebon*)”. Eman Mangopa dkk tahun 2022 dengan judul, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas Konstituen Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo*”. Muhtar Haboddin tahun 2016 dengan judul, “*Relasi Parlemen Dengan Konstituen*”, menyimpulkan bahwasannya mengenai dinamika kontestasi pemilu salah satunya pemilihan legislatif memerlukan yang namanya suara untuk menjadi penentu kemenangan, dimana suara didapat dari masyarakat atau konstituen. Menjalin hubungan dengan konstituen diperlukan bagi seorang calon untuk membentuk suara atau dukungan, disatu sisi suara yang sudah didapatkan menjadi alat untuk menang kembali ketika akan mencalonkan pemilihan selanjutnya. Merawat suara agar senantiasa berpihak dari konstituen diperlukan dalam rangka investasi politik. Berbagai bentuk cara dalam rangka merawat konstituen agar senantiasa memilih seorang calon yang membutuhkan suara, merawat konstituen harus dilakukan dengan tiga waktu, pada saat pencalonan untuk mencari dan membentuk hubungan dengan konstituen, duduk di kursi kekuasaan untuk merawat menggunakan fasilitas publik, dan pencalonan kembali untuk mempertahankan konstituen yang kemarin memilih dia.

Urgensi dalam penelitian ini adalah permasalahan ini akan memberikan penjelasan terkait kondisi politik lokal Kabupaten Ciamis yang tentunya menjadi pembeda antara tingkat Pileg DPRD Kota/Kabupaten dengan tingkat Pileg DPRD Provinsi atau DPRD yang memberikan keputusan terhadap keputusan politik yang tentunya saling berkesinambungan, penjelasan mengenai kekuatan politik elite lokal dimana mereka memanfaatkan struktur politik dan sosial dalam mempertahankan kekuasaan dengan penggunaan massa, modalitas politik, dan

jaringan dengan elite lain, dan adanya perubahan sosial politik bagaimana kekuatan politik elite berubah setelah runtuhnya order baru, dimana elite bebas untuk membentuk kekuasaan mereka.

Apabila penelitian ini menemukan bagaimana kekuatan politik Nanang dengan menggunakan teori kekuatan dan modalitas politik, maka ini menunjukkan kekuatan elite lokal daerah yang semakin kuat dengan bermainnya dalam kontestasi Pileg. Selain itu dengan adanya penggunaan instrumen kekuatan dan modalitas politik menjadi bentuk bahwa elite memiliki caranya masing-masing. Dengan penjelasan diatas maka peneliti akan mengangkat judul, “Kekuatan Politik Nanang Permana Dalam Pileg 2024 di Kabupaten Ciamis”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus memahami bagaimana cara dari bagaimana Nanang dalam membentuk dan penggunaan instrumen kekuatan politiknya yakni PDIP dan modalitas politik dia.. Maka dari penelitian ini ingin mengungkapkan apa saja instrumen kekuatan politik dan penggunaan modal politik.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang maka penulis akan merumuskan suatu pertanyaan yang dapat menemukan hasil penelitian sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian yakni:

1. Bagaimana kekuatan politik Nanang Permana dalam Pemilu Legislatif tahun 2024 di Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana modalitas dalam pemilihan Nanang Permana di Pemilu Legislatif tahun 2024 di Kabupaten Ciamis?



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas maka dari itu peneliti merumuskan tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana membentuk kekuatan politik Nanang Permana dalam Pemilu Legislatif tahun 2024 di Kabupaten Ciamis.
2. Mengetahui bagaimana Nanang Permana menggunakan modalitas politik dalam Pemilu Legislatif tahun 2024 di Kabupaten Ciamis.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis:**

1. Memberikan ilmu dan pengetahuan kekuatan politik lokal.
2. Penelitian ini bermanfaat untuk pengetahuan mengenai politik bagi masyarakat Ciamis.
3. Memberikan referensi kepada Peneliti selanjutnya mengenai kekuatan politik.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis:**

1. Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Ciamis dan elite politik.
2. Penelitian ini bermanfaat untuk pengetahuan mengenai politik bagi masyarakat Ciamis.
3. Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi.